

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ahmad Hamzah, Nanda Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Fajar Mulia.
- Ali Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra Pratama.
- Arief Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chazawi Adami. 2005. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Penerbit PT. Alumni.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
- Hamzah Andi, . 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun M.Husein. 1994. "Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya". Rineka Cipta : Jakarta.
- Manan Bagir. 2006. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Varia Peradilan Majalah Hukum No. 253 Desember 2006. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya,
- M. Natsir .Asnawi, 2013.. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UII Press.
- Marpaung Laden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moerad Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

- Mohammad Makaro Taufik.,Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mulyadi Lilik, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nugroho Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Jakarta : Prima Aksara.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Penerbit Bandung : Mandar Maju.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli H. Muhammad, 2007.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung. : Alumni.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunggono Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Wijayanta Tata., Hery Firmansyah. 2011.*Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta : Pustaka yustisia.

#### **Artikel Ilmiah :**

- Hidayat Rahmat. “*Diskresi Hakim Melalui Dissenting Opinion*”.  
[http://papalembang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1185:diskresi-hakim-melaluidissenting-opinon-dalam](http://papalembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:diskresi-hakim-melaluidissenting-opinon-dalam)

pembentukan-putusan--oleh-rahmat-hidayat-shi-mh-131-&catid=135:artikel &Itemid=182. 2014. hlm 6. Diakses pada tanggal 30 September 2017.

Mulyadi Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.*( online ) , ( [https : // badilum . info / upload \\_ file / img / article / doc / asas \\_ beban \\_ pembuktian\\_terhadap\\_tipikor\\_dalam\\_hukum\\_pidana\\_indonesia.pdf](https://badilum.info/upload_file/img/article/doc/asas_beban_pembuktian_terhadap_tipikor_dalam_hukum_pidana_indonesia.pdf)) .diakses tanggal 2 Januari 2018

Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt*, Vol.8 No.3,dalam <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49> diakses pada 11 Januari 2018

Syamsudin.M. 2011.*Rekontruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Volume.1 No.1, diakses tanggal 29 Desember 2017.

### **Peraturan PerUndang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

\_\_\_\_\_, Undang-undang No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang RI No 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Internet**

Anonim. “*Dissenting Opinion Di Mata Mantan Hakim Agung*”.  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f1005f68a4c/idissenting-opinion-i-di-mata-mantanhakim-agung>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

<http://rezkirasyak.blogspot.com/2012/04/korupsi-dan-jenis-jenis-korupsi.html>  
diakses tanggal 24 Desember 2017

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-pakar.html> diakses tanggal 29 Desember 2017

<http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/79-pengelompokan-tindak-pidana-korupsi> diakses tanggal 29 Desember 2017